

BAB II

TINJAUAN TERORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi

2.1.1.1. Pengertian Partisipasi

Menurut (Echols dan Shadily, Soetrisno 2005, hlm 419) Partisipasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan dan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi dalam urusan publik telah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Banyak orang menggunakan kata partisipasi, sehingga tanpa kata partisipasi sepertinya akan semakin sedikit ruang untuk diskusi, seminar, konsultasi atau kebijakan yang diprakarsai oleh masyarakat. Kata ini dikaitkan dengan kegiatan yang berwawasan pembangunan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Sementara sufiks menunjukkan kata sifat yang dimaksudkan untuk menjelaskan akar kata, partisipasi memiliki lebih banyak arti daripada kata sifat yang menggambarkan proses.

Menurut (Asy'ari, Musa, 1997, hlm. 202) Partisipasi adalah seorang pengambil keputusan yang menawarkan suatu kelompok atau komunitas dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pendapat, barang, keterampilan, materi dan jasa. Partisipasi berarti bahwa kelompok mengenali masalah mereka sendiri, menimbang pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalah. Selanjutnya (Arianto, Roni, 2017, hlm. 35) mengemukakan partisipasi adalah “sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”.

Sedangkan (Dwiningrum, Siti Irena Astuti. 2011, hlm. 206) menyebutkan partisipasi adalah sebagai berikut: “Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual”.

Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Kami berbicara tentang keterlibatan vertikal karena, dalam kondisi tertentu, dapat terjadi bahwa orang terlibat atau berpartisipasi dalam program

pihak lain, dalam suatu hubungan di mana komunitas dapat dianggap sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal karena tidak pernah mustahil masyarakat berinisiatif, dengan masing-masing anggota/kelompok masyarakat saling berpartisipasi secara horizontal, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam melakukan kegiatan pada persoalan lain. Tentunya keikutsertaan ini merupakan tanda awal tumbuhnya sebuah perusahaan yang dapat berkembang secara mandiri.

(Badruzzaman, Deden Fajar, 2009, hlm. 287) menyatakan bahwa partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang di dalamnya dilakukan upaya-upaya, termasuk perlunya perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proses dan pengembangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan dalam Pasal 1(41): Partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan kepentingannya kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi atau partisipasi merupakan salah satu prinsip otonomi daerah dan kota/masyarakat harus mampu meningkatkan partisipasi. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk hak, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak atas informasi dan pelayanan yang adil dan merata.

Berdasarkan pengertian di atas, maka konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Partisipasi global dapat disimpulkan merupakan bentuk keterlibatan kolaboratif dalam kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Bentuk partisipasi dapat berupa saran, pelayanan atau dalam bentuk materi secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana yang demokratis.

2.1.1.2. Bentuk Partisipasi

Idealnya, partisipasi harus berbentuk partisipasi interaktif atau self-organization, tetapi jelas ini membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang optimal. Partisipasi telah lama dibicarakan dan digaungkan di berbagai forum dan kesempatan. Maksudnya adalah masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan, mempercepat,

mempercepat dan menjamin keberhasilan dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai bagian dari “partisipasi” atau sebagai partisipasi dalam kegiatan bersama.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat kelompok, terdapat berbagai bentuk partisipasi. (Dwiningrum, Siti Irena Astuti. 2011, hlm. 72) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi simbolik, orang duduk di lembaga resmi tanpa melalui proses pemilu dan tidak memiliki kekuasaan yang nyata.
2. Partisipasi pasif, masyarakat diberitahu tentang apa yang telah diputuskan dan apa yang telah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan komentar publik, sehingga informasi hanya berjalan satu arah.
3. Partisipasi Konsultatif, masyarakat berpartisipasi dengan menjawab banyak pertanyaan. Hasil tanggapan dianalisis oleh pihak luar untuk mengidentifikasi masalah dan cara penyelesaiannya tanpa memperhitungkan pendapat masyarakat.
4. Dengan berpartisipasi dengan insentif materi, orang menyumbangkan energinya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber daya tetapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak memiliki komitmen untuk melanjutkan partisipasi mereka setelah periode insentif berakhir.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dalam menanggapi permintaan dari instansi luar untuk mencapai tujuan. Mungkin ada keputusan bersama, tetapi ini biasanya terjadi setelah keputusan besar dibuat.
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan dan analisis rencana kerja. Partisipasi dipandang sebagai hak dan bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, prosesnya melibatkan pencarian perspektif lain dan menggunakan proses pembelajaran yang terstruktur. Ketika komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan, komunitas akan lebih terlibat dalam penyebab lokal dan institusi komunitas juga akan menjadi lebih kuat.

7. Self-organizing, masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan tindakannya sendiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga luar untuk mendapatkan sumber daya dan saran teknis yang diperlukan, tetapi kendali atas bagaimana sumber daya ini digunakan sepenuhnya berada di tangan masyarakat.

Ada beberapa jenis partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. kedua (Sundariningrum, 2001, hlm. 38) mengklasifikasikan partisipasi menurut metode keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi langsung, partisipasi yang terjadi ketika individu melakukan kegiatan tertentu dalam proses partisipatif. Partisipasi ini terjadi ketika setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya, mendiskusikan materi, menentang keinginan orang lain atau perkataannya.
2. Partisipasi tidak langsung, partisipasi yang terjadi ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh (Sundariningrum, 2001, hlm. 2) yang menyebutkan bahwa dilihat dari tingkat partisipasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan Partisipasi dalam proses perencanaan dan hubungannya dengan program lain
2. partisipasi dalam pelaksanaannya.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini terutama tentang pembentukan alternatif dengan masyarakat mengenai ide atau gagasan yang menyentuh kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini, masyarakat meminta pendapat tentang arah dan arah pembangunan. Bentuk partisipasi ini antara lain mengikuti rapat, diskusi, mengajukan gagasan, menanggapi atau menolak usulan program.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi mobilisasi sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan pengembangan program. Ketiga, pembagian keuntungan. Partisipasi ini tidak dapat dipisahkan secara kuantitatif dan kualitatif dari hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program. Secara kualitas terlihat peningkatan produksi, sedangkan kuantitas menunjukkan tingkat keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini akan membahas isu-isu yang terkait dengan penyampaian program secara keseluruhan. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk menentukan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya

Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan proses dan tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik secara fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung arti terlibat dalam perubahan, melaksanakan proses pembelajaran menuju perbaikan dan peningkatan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Secondo (M. Anwas, 2014, hlm. 92) Salah satu indikator atau syarat partisipasi adalah seberapa besar tingkat partisipasi, yang berarti situasinya lebih baik dari yang lain. Kondisi tersebut adalah:

1. Butuh waktu lama untuk berpartisipasi sebelum Anda bertindak. Partisipasi tidak terjadi secara tiba-tiba.
2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai ekonomi, dan sebagainya.
3. Topik partisipasi harus relevan dengan organisasi, partisipasi adalah sesuatu yang menarik perhatian partisipasi atau dipandang sebagai pekerjaan yang menuntut.
4. Partisipasi harus memiliki kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif. Peserta harus mampu berkomunikasi agar dapat bertukar pikiran
5. Tidak ada yang merasa terancam oleh partisipasi; Partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana melanjutkan seluruh organisasi hanya dapat terjadi dalam lingkungan kebebasan kerja kelompok.

Prinsip-prinsip partisipasi sebagaimana tertuang dalam Guide to Implementing Participatory Approach yang disusun oleh Department for International Development (DFID) tahun (Monique Sumampouw, 2004, hlm. 107) adalah sebagai berikut:

1. Menutupi. Setiap orang atau perwakilan dari suatu kelompok yang dipengaruhi oleh hasil pengambilan keputusan atau proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (equal partnership). Pada dasarnya setiap orang memiliki keterampilan, kemampuan dan inisiatif serta berhak menggunakan inisiatif tersebut untuk terlibat dalam setiap proses untuk membangun dialog tanpa memandang level dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus mengembangkan komunikasi dan iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif untuk mewujudkan dialog.
4. Kesetaraan wewenang (shared power/equal power). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan pembagian wewenang dan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi.
5. Tanggung jawab yang sama (sharing of responsibility). Pihak yang berbeda memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena kesetaraan kekuasaan (power sharing) dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan tahapan selanjutnya.
6. Keterlibatan diri Keterlibatan berbagai pihak tidak terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga partisipasi aktif dalam setiap proses kegiatan menciptakan proses saling belajar dan saling memberdayakan.
7. Kerja sama. Perlu memanfaatkan kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi manfaat guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia.

2.1.1.3. Dimensi Partisipasi

Partisipasi menjadi menonjol dan penting dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan penggunaan lahan, antara lain untuk hal-hal positif yang dikandungnya, sebagaimana dikemukakan oleh (Muhammad, Jacob 1986, hlm. 27) mengemukakan bahwa partisipasi adalah sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat, memilih dan memutuskan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan upaya mengatasi masalah dan melibatkan

masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Lebih lanjut (Santoso, 2008, hlm. 87) menyatakan bahwa partisipasi meliputi:

1. Lebih banyak pekerjaan dapat dilakukan dengan partisipasi.
2. Partisipasi dapat memberikan pelayanan atau jasa dengan biaya rendah.
3. Partisipasi memiliki nilai inti yang sangat penting bagi peserta karena ini menyangkut harga diri mereka.
4. Ini adalah katalis untuk kemajuan.
5. Mendorong berkembangnya rasa tanggung jawab.
6. Memastikan bahwa kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dilibatkan
7. Pastikan pekerjaan dilakukan dengan arah yang benar.
8. Kumpulkan dan gunakan pengetahuan yang berbeda di masyarakat sehingga ada kombinasi keterampilan yang berbeda.
9. Bebaskan manusia dari ketergantungan pada keterampilan orang lain.
10. Menyadarkan masyarakat akan penyebab kemiskinan dan dengan demikian meningkatkan kesadaran akan upaya penanggulangannya.

Sementara itu, menurut (Muhammad, Jacub 1986, hlm. 32), partisipasi dapat dipandang menurut beberapa dimensi atau tahapan, yaitu:

1. Tahap evaluasi Hal ini dilakukan dengan memetakan masalah dan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, masyarakat secara aktif terlibat dalam merasakan masalah-masalah yang muncul sepenuhnya di luar pandangan mereka.
2. Tahap perencanaan program atau kegiatan alternatif, melibatkan warga dalam merefleksikan masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mereka dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan program alternatif yang berbeda..
3. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan dengan melaksanakan program yang terencana dengan baik agar tidak menyimpang dari pelaksanaannya di lapangan, oleh karena itu tahap ini dianggap sebagai tahap yang paling krusial..

Maka dari berbagai teori terhadap para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi itu seperti sebuah organisasi, walaupun diwarnai dengan

perdebatan panjang antara praktisi dan ahli teori tentang organisasi sebagai alat yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa Perbedaan antara organisasi dan partisipasi terletak pada sifat bentuk organisasi yang terlibat. biasanya terbentuk atau organisasi yang muncul dan terbentuk sebagai akibat dari partisipasi.

2.2. Program Kewirausahaan

2.2.1. Pengertian Kewirausahaan

Menurut (Alam, Bukhari, 2000 hlm. 137) kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting bagi seorang wirausahawan dan oleh karena itu dapat diartikan sebagai: kualitas tertentu, keterampilan tertentu, tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha.

(Raymond W. Kao Concours Lupioadi, 2005, hlm. 27) Merujuk pada kewirausahaan sebagai suatu proses, yaitu proses menciptakan sesuatu yang baru (*re-creation*) dan membedakan sesuatu dari yang sudah ada (inovasi).

Sedangkan menurut (Winardi, 2008, hal 27), ciri-ciri setiap wirausahawan sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk sukses.
2. Berani mengambil resiko.
3. Keinginan yang kuat untuk berbisnis
4. Seorang oportunist yang melihat peluang.

Kewirausahaan berkembang dan dimulai dengan inovasi. Inovasi disebabkan oleh faktor pribadi, lingkungan dan sosiologis. Faktor individu yang merangsang kewirausahaan adalah tempat kontrol, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, keterlibatan dan ketidakpuasan. Inovasi dari lingkungan adalah peluang, model, aktivitas, pesaing, tempat berkembang biak, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Pemicu yang berasal dari lingkungan sosial adalah keluarga, kerabat dan jaringan kelompok.

Menurut (Slamet Widodo 2006, hlm. 72), pembentukan partisipasi santri dalam berwirausaha harus melibatkan beberapa langkah yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kerja sama

Perlu memanfaatkan kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi manfaat guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia.

2. kapasitas modal

Modal adalah modal kerja yang digunakan sebagai modal untuk berdagang, membelanjakan uang, dll. Modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan kegiatan komersial. Oleh karena itu, modal itu sangat penting ketika berpartisipasi. Oleh karena itu, peran setiap orang sangatlah penting. Dapat dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program pemerintah, dana masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas Pengelola Pondok Pesantren

Pesantren perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya, salah satunya adalah penyiapan sumber daya manusia yaitu pengelola, tutor atau guru. Pengembangan budaya kewirausahaan ini berlangsung melalui model inkubasi bisnis, sehingga unit-unit bisnis berkembang di lingkungan pondok pesantren. Bidang pekerjaan ini nantinya akan menjadi sarana pendidikan bagi santri mengenai keterampilan teknis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kompetensi pengelola dan guru pondok pesantren dalam aspek manajemen, keterampilan teknis bisnis, dan metode pembelajaran kewirausahaan.

Menurut (Musa Asy'ari 2012, 81) peningkatan kapasitas permodalan sebesar:

1. Pelatihan Usaha

Tujuan pendidikan adalah untuk membekali santri dengan visi dan pengalaman yang komprehensif sehingga dapat membangun motivasi santri dan memiliki pengetahuan teoritis untuk menguasai teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Diharapkan melalui pelatihan dapat dicermati trik-trik tertentu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi kegagalan sekecil mungkin dalam pengembangan kegiatan wirausaha.

2. Pemeliharaan dalam fase pendampingan

Ketika usaha sedang berjalan, calon wirausahawan harus didampingi oleh rekan-rekan profesional yang bertindak baik sebagai pemberi pengaruh maupun sebagai mentor. Sehingga kegiatan usaha yang digelutinya dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, upaya pembangunan dapat dipertahankan. Tahap pendampingan ini dapat mengecek kestabilan aset, sehingga diperlukan pendampingan. Kemudian fase bimbingan belajar menguatkan santri agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Tahap bimbingan belajar dapat dilakukan secara berkala tergantung dari perkembangan masalah yang dihadapi

3. Jaringan bisnis

Proses bisnis ini adalah perlunya membentuk kantong-kantong jemaah bisnis yang sesuai dengan potensi geografis. Melalui kantong niaga Jamaah Wirausaha diharapkan dapat memperkuat jaringan niaga yang saling melengkapi dan memperluas pasar.

4. Pendidikan kewirausahaan

Pemberian pendidikan kewirausahaan merupakan persiapan awal untuk memberikan fasilitas bagi santri wirausaha. ruang lingkup pendidikan kewirausahaan meliputi karakter, konsep dan keterampilan.

Sedangkan materi yang akan diajarkan dalam pendidikan kewirausahaan meliputi: (1) konsep dasar kewirausahaan; (2) semangat dan sikap kewirausahaan; (3) pengembangan kreativitas; (4) pengembangan ide bisnis; (5) penyusunan rencana bisnis; (6) memulai dan mengembangkan bisnis; (7) keterampilan teknis kewirausahaan. Menurut Solomon dan Fernald, pendidikan kewirausahaan harus dilengkapi dengan berbagai atribut, keterampilan dan perilaku yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka.

2.2.2. Pesantren Berbasis Kewirausahaan

2.2.2.1. Pengertian

Istilah “pesantren” menurut (Peter P. Drucker, 1985, hlm. 33) adalah “tempat santri” “Seminar Jawa Bagi Santri (Santri) di Pulau Jawa dan Madura.

Sedangkan menurut Dhofler berasal dari kata “santri” yang diawali dengan awalan “pe” dan akhiran “an” (menjadi aponderren), yang berarti tempat tinggal para wali.

Dari kata santri (santri) menurut etimologi pesantren adalah perguruan “tempat santri”. suku kata "antara" (suka membantu). Oleh karena itu kata “pondok pesantren” dapat diartikan sebagai “tempat belajar manusia yang baik”. Santri atau santri dididik oleh pimpinan pesantren (kiai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Kursus-kursus tersebut mencakup berbagai bidang agama Islam.

Menurut (Zamakhsyari Dhofier 1983, hal. 122) pondok pesantren memiliki lima (5) unsur antara lain:

1. Masjid

Masjid merupakan bagian integral dari perguruan tinggi Islam dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk melatih santri mendisiplinkan sholat berjamaah dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri.

2. Kiai

Kiai adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang ahli di bidang agama, memimpin renungan, dan mengajarkan buku kepada anak didiknya.

3. Pondok

Pondok merupakan tempat tinggal para santri yang menuntut ilmu agama di bawah bimbingan seorang ustadz atau kiai.

4. Pelajaran Kitab-Kitab

Sejak berada di pondok pesantren, para santri mulai mempelajari Kitab-Kitab Klasik untuk mengejar tujuan utama pesantren, yaitu melatih calon-calon kunci yang setia pada ajaran Islam. Yang dimaksud kitab-kitab Pesantren klasik yaitu: Nahwu, Nerfs, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits, Tafsir, Tauhid. Tasawuf, kurma dan balaghah

5. Santri

Santri adalah orang yang belajar agama dan menuntut ilmu di pondok pesantren. Santri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Santri mukim adalah para santri yang datang dari tempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari, sehingga mereka tinggal di pondok pesantren dan memiliki kewajiban tertentu.
- b. Santri kelelawar yang merupakan santri yang berasal dari daerah dan dipulangkan pada akhir kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren harus meningkatkan kapasitas kelembagaannya, termasuk penyiapan sumber daya manusia yaitu pengelola, tutor atau guru.

Pengembangan budaya wirausaha ini melalui model inkubator bagi unit-unit usaha untuk tumbuh di lingkungan pondok pesantren. Bidang kegiatan ini selanjutnya menjadi sarana pembelajaran bagi santri dalam hal keterampilan teknis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola dan pengawas dalam aspek manajemen, keterampilan teknis bisnis dan metode pembelajaran kewirausahaan.

Menurut (Anugrah Pekerti, 1998, hal 20) menunjukkan bahwa ruang lingkup pendidikan kewirausahaan meliputi karakter, konsep dan keterampilan. Materi yang diajarkan dalam pendidikan kewirausahaan meliputi: (1) konsep dasar kewirausahaan; (2) semangat dan sikap kewirausahaan; (3) pengembangan kreatif

2.2.2.2 Fungsi dan Peran Pondok Pesantren

Pesantren berfungsi sebagai pusat penyebarluasan agama Islam yang mengandung kekuatan perlawanan terhadap pengaruh modernisasi sebagaimana yang telah dilakukan terhadap kolonialisme di masa lalu. Fungsi lainnya adalah sebagai instrumen untuk lebih melestarikan ajaran Islam di Indonesia. nusantara, karena pesantren memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, budaya, politik, keagamaan, dan lain-lain (Didin Hafidhuddin, 1998, hlm. 120).

Diketahui pula bahwa pondok pesantren dapat berperan dalam pembangunan. Ada tiga jenis peran yang dapat dimainkan oleh pesantren, yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput, yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

2. Memperluas secara politik, melalui jejaring, kerjasama, baik dalam suatu negara maupun dengan lembaga internasional lainnya
3. Ikut menentukan arah dan agenda pembangunan. (Shulthon masyhud, khusnurdilo, 2005, hlm 120)

Oleh karena itu, menurut penulis, fungsi pondok pesantren adalah menciptakan manusia yang bertaqwa, memiliki mentalitas serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2.3 Pelaksanaan kewirausahaan Santri

Implementasi (*implementasi*) adalah suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Setelah (Slamet Widodo, 2010. hlm., 111-116) pelaksanaan kewirausahaan santri harus dilanjutkan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi jenis Usaha

Mengembangkan potensi yang ada di sekitar masyarakat. Dalam bidang kewirausahaan pondok pesantren, Dalam mengembangkan budaya start-up ini, juga harus memperhatikan potensi yang ada di sekitarnya. Pertimbangan tersebut untuk kenyamanan dan pengembangan model usah yang nantinya menjadi wadah bagi santri untuk belajar dan berlatih berwirausaha. hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Partisipasi (PRA atau FGD)

PRA adalah pemahaman partisipatif tentang kondisi pedesaan, suatu pendekatan untuk merumuskan rencana dan kebijakan di perdesaan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin melalui pemetaan wilayah, pembuatan tempat, waktu, kalender musim dan rencana kegiatan. Sedangkan FGD bertujuan agar peserta dapat menyampaikan pandangannya dengan menekankan program yang akan dilaksanakan dengan mengartikulasikan tujuan FGD. secara jelas, mengidentifikasi dan memilih peserta yang terdiri dari aktor-aktor dari kegiatan terkait, dengan menyiapkan ruang untuk diskusi, dengan melaporkan hasil diskusi.

- b. Analisis SWOT Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threatment) dilakukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan di

lapangan pada saat FGD. Sebelum memulai program, perlu dilakukan analisis SWOT dalam upaya implementasi, untuk menjaga peluang dan mengantisipasi kelemahan.

2. Kapasitas Modal

Modal adalah modal usaha yang digunakan sebagai modal untuk berdagang, mengeluarkan uang, dll. Ekuitas ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu modal itu sangat penting ketika melakukan usaha. Sehingga peran seluruh pemangku kepentingan menjadi penting melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), program pemerintah, dana masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas pengelola pondok pesantren.

Pondok pesantren harus meningkatkan kapasitas kelembagaannya, termasuk penyiapan sumber daya manusia, yaitu manajer, guru atau dosen. Pengembangan budaya wirausaha ini berlangsung melalui model inkubasi busaha, sehingga unit-unit usaha berkembang di lingkungan pondok pesantren. Unit usaha ini nantinya akan menjadi sumber pelatihan bagi santri dalam keterampilan teknis. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kompetensi pengelola dan guru pondok pesantren dalam aspek manajemen, keterampilan teknis bisnis, dan metode pembelajaran kewirausahaan. Menurut (Musa Asy'ari, 2012, hlm. 227),

2.4 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Acmad Qosim dengan judul “Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Santri (Studi di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo)” Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Dalam skripsi ini membahas mengenai Analisis Penerapan Manajemen Unit Usaha Pondok Pesantren, Penerapan Manajemen Unit Usaha dalam Mengembangkan Kewirausahaan Santri serta partisipasi santri dalam kewirausahaan. sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai partisipasi santri melalui pertanian Berbasis kewirausahaan.

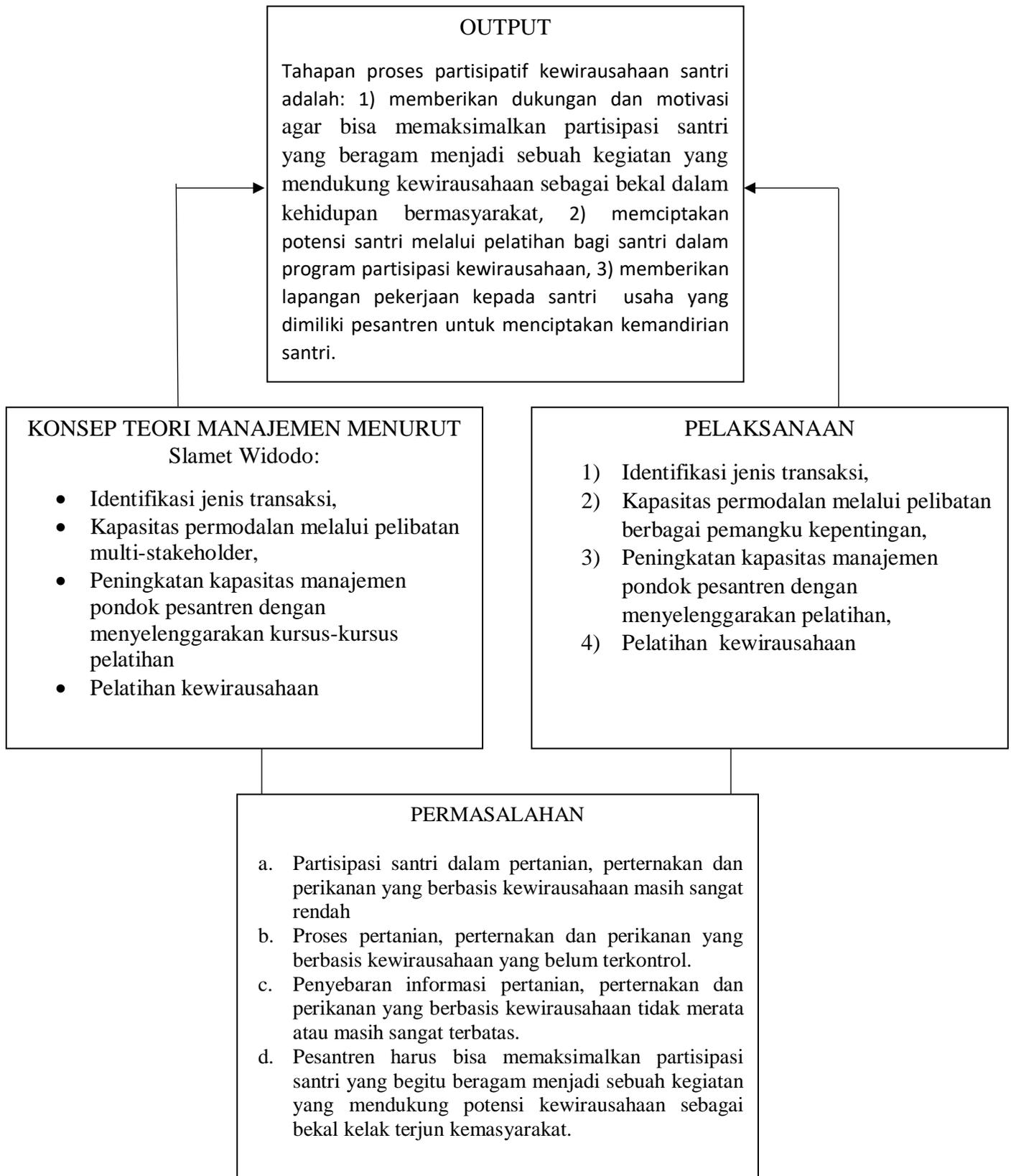
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna Ciptasari dengan judul “Kewirausahaan Santri di Pondok Pesantren Fauzan Kota Tasikmalaya”. Jurusan Pendidikan Ekstrakurikuler Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2017. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Survei ini menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha di Pondok Pesantren Fauzan Desa Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya terdiri dari kegiatan harian, mingguan dan tahunan. Hal ini dilakukan melalui proses penyadaran yang dilakukan program *Santripreneur* melalui motivasi dan sosialisasi melalui ceramah pada setiap kegiatan dan studi banding pembelajaran kolaboratif di perusahaan. Pelaksanaan program melalui peningkatan kapasitas dengan memberikan berbagai pelatihan bisnis antara lain menjahit, pertanian, konstruksi, percetakan, perikanan, catering, peternakan dan magot BSF. Selain proses pemberian kesempatan kepada mahasiswa melalui pengembangan usaha oleh perguruan tinggi Islam khususnya peternakan, perikanan, magot BSF, catering dan pers. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian di ranah digital dan non-digital dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang partisipasi mahasiswa melalui pertanian berbasis kewirausahaan, yang tentunya akan sedikit berbeda.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fendi Astrianto yang berjudul “Partisipasi Ekonomi Berbasis Pesantren Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Sleman Yogyakarta 2017. Dalam skripsi ini sama-sama mengangkat permasalahan mengenai partisipasi ekonomi berbasis pesantren, hanya saja skripsi ini fokus penelitiannya kepada program keterampilan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, sedangkan penulis meneliti partisipasi santri melalui pertanian Berbasis kewirausahaan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hardhike Septyana (2013) yang berjudul “Partisipasi Kewirausahaan Terhadap Santri di Pondok Pesantren”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013”. Jurusan Pendidikan Luar

Sekolah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya berisikan mengenai partisipasi kewirausahaan terhadap santri di Pondok Pesantren.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chilmamin Tamami yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Dengan Sistem Hidroponik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019” yang hasil penelitiannya yaitu berisikan mengenai masyarakat desa sekitar kawasan dengan sistem hidroponik.

2.5 Kerangka Konseptual

Tahapan proses partisipasi wirausaha santri yang dilakukan oleh Pesantren Fauzan Desa Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya adalah: 1) memberikan dukungan dan memotivasi agar bisa memaksimalkan partisipasi santri yang beragam menjadi sebuah kegiatan yang mendukung kewirausahaan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, 2) menciptakan potensi santri melalui pelatihan bagi santri dalam program pendidikan kewirausahaan, 3) memberikan kesempatan kerja bagi santri melalui pengembangan usaha ponpes untuk mewujudkan kemandirian santri. Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.6 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Partisipasi Santri Melalui Pertanian, Perikanan dan Perternakan Berbasis Kewirausahaan Di Pesantren Fauzan?